



Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata di Desa Sembalun Bumbung

Ilham M. Akbar^{1*}, Sukuryadi¹, Nurhayati¹, Ibrahim Ali¹, Joni Safaat Adiansyah¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.2850>

Article Info:

Received : 10 Agustus 2026
Revised : 19 September 2026
Accepted : 29 September 2026
Published : 07 Oktober 2026

Correspondence:

Ilham M. Akbar

Phone:

Abstract: Tourism growth in priority rural areas increases waste generation, while community participation in waste management often remains weak. This study analyzes the influence of social capital (trust, networks, and norms) on environmental sustainability and economic welfare, in order to formulate directions for strengthening community participation in sustainable waste management in Sembalun Bumbung Village, East Lombok. A sequential explanatory mixed methods design was used. Questionnaires were distributed to 57 respondents selected by proportionate stratified random sampling across twelve hamlets, complemented by in-depth interviews, field observations, and documentation. Data were analyzed using multiple linear regression. Social capital simultaneously explained 93.0% of the variation in environmental sustainability ($F = 233.779$; $p < 0.001$), with networks ($\beta = 0.589$; $p < 0.001$) and trust ($\beta = 0.301$; $p = 0.006$) as significant partial predictors, while norms were not significant ($p = 0.068$). Social capital also explained 50.9% of economic welfare, although no dimension was partially significant and the reliability of the welfare instrument was below the threshold. These findings indicate that strengthening local organizational networks and trust, supported by village regulations and circular economy-based economic incentives, is a priority for strengthening community participation.

Keywords: Community Participation; Sustainable Waste Management; Social Capital; Rural Tourism; Sembalun Bumbung.

Citation: Akbar, I. M., Nurhayati, Ali, I., & Adiansyah, J. S. (2026). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata di Desa Sembalun Bumbung. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(4), 6079–6084. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.2850>

Pendahuluan

Pengelolaan sampah di kawasan wisata perdesaan menghadapi tekanan yang semakin besar seiring meningkatnya jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukungnya. Pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan target pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada tahun 2025. Namun, implementasi di tingkat tapak masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, pendanaan, partisipasi

masyarakat, serta lemahnya pemantauan dan evaluasi. Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, merupakan kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/310/PD/2024 (Hesti et al., 2025).

Desa ini dikenal dengan agrowisata hortikultura, budaya tradisional, dan perannya sebagai gerbang utama pendakian Gunung Rinjani. Peningkatan kunjungan wisatawan memberi dampak ekonomi positif, tetapi juga meningkatkan timbunan sampah plastik sekali pakai dan limbah kuliner yang belum terkelola optimal (Hesti et al., 2025). Pemerintah desa telah menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST), menyelenggarakan pelatihan, dan membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan. Meskipun demikian, observasi awal menunjukkan masih terjadinya pembuangan sampah sembarangan, terutama di sekitar jalur pendakian dan kawasan agrowisata, sementara sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi belum tertata.

Kajian terdahulu di Sembalun menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sosial-kelembagaan. Hesti et al. (2025) menemukan perbedaan kepentingan dan peran antarpemangku kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah, sedangkan Haqiqi (2026) menyimpulkan bahwa program *Zero Waste* melalui bank sampah di Kecamatan Sembalun masih bersifat voluntarisme dan belum terlembaga kuat. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup ditopang oleh sarana fisik, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara kolektif.

Salah satu kerangka yang menjelaskan tindakan kolektif masyarakat adalah teori modal sosial. Putnam (1993) memandang modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama demi kepentingan bersama. Konsep ini juga dikembangkan oleh Coleman (1988), dan dalam pengelolaan sumber daya bersama, kepercayaan serta aturan kolektif menjadi prasyarat tindakan kolektif yang berkelanjutan (Ostrom, 1990). Pretty dan Ward (2001) menunjukkan keterkaitan antara modal sosial dan pengelolaan lingkungan oleh masyarakat. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai penguatan modal sosial yang melandasinya.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya pengukuran kuantitatif atas peran masing-masing dimensi modal sosial di kawasan ini. Kajian di Sembalun, seperti Galante (2023) dan Hesti et al. (2025), bersifat deskriptif-kualitatif dan berfokus pada strategi serta pemetaan pemangku kepentingan, sehingga belum menunjukkan seberapa besar kepercayaan, jaringan, dan norma memengaruhi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi.

Tanpa ukuran tersebut, upaya penguatan partisipasi masyarakat berisiko tidak tepat sasaran karena belum diketahui dimensi mana yang memiliki daya ungkit terbesar. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) pengujian kuantitatif pengaruh parsial dan simultan tiga dimensi modal sosial pada kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata di Desa Sembalun Bumbung; (2) pepaduan hasil statistik dengan data kualitatif mengenai regulasi, tata kelola, dan peran pelaku wisata; serta (3) perumusan prioritas penguatan partisipasi masyarakat yang berbasis bukti empiris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi modal sosial, kesejahteraan

ekonomi, dan kelestarian lingkungan masyarakat; (2) menganalisis pengaruh parsial dan simultan modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan; serta (3) merumuskan arah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Desa Sembalun Bumbung.

Metode

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*, yaitu metode kuantitatif sebagai metode utama yang diperdalam dengan data kualitatif (Schoonenboom & Johnson, 2017). Penelitian dilaksanakan di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi dipilih secara purposif karena merupakan kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata dengan tantangan pengelolaan sampah yang kompleks dan karakteristik modal sosial yang khas sebagai kawasan lingkaran Gunung Rinjani. Penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di dua belas dusun di Desa Sembalun Bumbung beserta pemangku kepentingan pariwisata. Ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin pada tingkat presisi 13 persen, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya pada wilayah bermedan pegunungan, sehingga diperoleh 57 responden. Sampel dialokasikan secara proporsional pada setiap dusun (*proportionate stratified random sampling*) dan mencakup masyarakat umum, pelaku usaha pariwisata (pemilik homestay dan restoran), pemandu dan porter pendakian, tokoh masyarakat, serta perangkat desa. Tingkat presisi tersebut lebih longgar daripada konvensi umum penelitian sosial (5–10 persen), sehingga hasil perlu dimaknai dengan margin kesalahan yang lebih besar.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Data kuantitatif dikumpulkan dengan kuesioner tertutup berskala Likert 1–5 yang terdiri atas 45 pernyataan: lima butir untuk masing-masing kepercayaan (X1), jaringan (X2), dan norma (X3), serta 15 butir untuk masing-masing kesejahteraan ekonomi (Y1) dan kelestarian lingkungan (Y2). Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan timbal balik antarwarga dan dengan pemangku kepentingan pariwisata; jaringan sebagai kerapatan dan efektivitas jejaring organisasi lokal; norma sebagai kepatuhan terhadap aturan dan kebiasaan kolektif menjaga kebersihan; kesejahteraan ekonomi sebagai manfaat

ekonomi dari pariwisata dan pengelolaan sampah; dan kelestarian lingkungan sebagai keberhasilan menjaga kualitas lingkungan dari dampak sampah. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, petugas TPST, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha wisata; observasi lapangan pada musim ramai dan musim sepi kunjungan; serta dokumentasi kebijakan dan laporan resmi.

Analisis Data

Validitas diuji dengan korelasi item-total terkoreksi terhadap r -tabel 0,261 ($n = 57$; $\alpha = 5$ persen), dan reliabilitas dengan Cronbach's Alpha pada ambang 0,70 (Sugiyono, 2017). Sebelum regresi dilakukan uji normalitas residual (Kolmogorov-Smirnov), multikolinearitas (*Variance Inflation Factor*), heteroskedastisitas (Breusch-Pagan), dan autokorelasi (Durbin-Watson). Pengaruh modal sosial diuji dengan dua model regresi linier berganda, yaitu $Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ dan $Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, melalui uji t , uji F , koefisien determinasi, serta sumbangan efektif (SE) dan sumbangan relatif (SR) pada taraf signifikansi 5 persen. Pengolahan menggunakan SPSS yang divalidasi silang dengan pustaka statsmodels pada Python. Data kualitatif dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta *member check*.

Hasil dan Diskusi

Kualitas Instrumen dan Pemenuhan Asumsi

Instrumen kepercayaan, jaringan, norma, dan kelestarian lingkungan dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha berturut-turut sebesar 0,974; 0,967; 0,809; dan 0,982. Seluruh instrumen memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Instrumen kelestarian lingkungan memperoleh nilai reliabilitas tertinggi, sedangkan instrumen norma memiliki nilai terendah. Meskipun demikian, kedua instrumen tetap memenuhi kriteria reliabilitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki tingkat konsistensi yang memadai untuk mengukur variabel penelitian. Nilai reliabilitas yang tinggi pada instrumen kepercayaan dan jaringan menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan di dalamnya memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Sementara itu, instrumen norma juga menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima untuk keperluan penelitian. Secara keseluruhan, hasil pengujian mendukung penggunaan keempat instrumen dalam pengumpulan data. Namun, validitas instrumen perlu didasarkan pada hasil pengujian validitas yang terpisah, karena nilai Cronbach's Alpha hanya mengukur reliabilitas. Dengan demikian, instrumen

dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan, jaringan, norma, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sebaliknya, instrumen kesejahteraan ekonomi hanya memiliki lima dari 15 butir valid dengan alpha 0,664, di bawah ambang 0,70, sehingga temuan terkait variabel ini bersifat indikatif. Residual Model 2 berdistribusi normal ($KS = 0,085$; $p = 0,770$), seluruh nilai VIF berada di bawah 10 ($X_1 = 8,40$; $X_2 = 5,88$; $X_3 = 2,97$) meskipun kepercayaan mendekati batas, dan nilai Durbin-Watson mendekati 2 (1,955 dan 1,932). Model 2 terindikasi heteroskedastisitas (Breusch-Pagan $p = 0,022$), sehingga signifikansi koefisien pada model tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Kondisi Modal Sosial, Kesejahteraan Ekonomi, dan Kelestarian Lingkungan

Tabel 1. Deskripsi variabel penelitian ($n = 57$)

Variabel	Mean	SD	Kategori
Kepercayaan (X1)	2,79	1,32	Sedang
Jaringan (X2)	3,25	1,35	Sedang
Norma (X3)	3,56	0,58	Tinggi
Kesejahteraan Ekonomi (Y1)	1,85	0,35	Rendah
Kelestarian Lingkungan (Y2)	3,21	1,16	Sedang

Tabel 1 menunjukkan bahwa norma merupakan dimensi modal sosial dengan skor tertinggi, yaitu 3,56, yang termasuk kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa norma sosial memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Norma tersebut dapat tercermin melalui kepatuhan terhadap aturan dan kesepakatan bersama. Sementara itu, dimensi jaringan memperoleh skor 3,25 dan termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan sosial antaranggota masyarakat telah terbentuk, tetapi masih berpotensi untuk diperkuat. Dimensi kepercayaan memperoleh skor 2,79 dan juga termasuk kategori sedang.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan sosial belum sepenuhnya merata di antara responden. Pada aspek lingkungan, kelestarian lingkungan memperoleh skor 3,21 dan termasuk kategori sedang. Hasil tersebut sejalan dengan observasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan penelitian baru berjalan secara efektif pada sebagian aspek. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi memperoleh skor 1,85 dan termasuk kategori rendah. Skor tersebut mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata dan pengelolaan

sampah belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Namun, interpretasi terhadap indikator kesejahteraan ekonomi perlu dilakukan secara hati-hati karena instrumennya memiliki keterbatasan reliabilitas. Selain perbedaan skor rata-rata, setiap dimensi modal sosial juga menunjukkan tingkat variasi respons yang berbeda. Dimensi norma memiliki standar deviasi terkecil, yaitu 0,58, dibandingkan dengan kepercayaan sebesar 1,32 dan jaringan sebesar 1,35. Rendahnya variasi skor norma menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung lebih seragam dibandingkan jawaban pada dimensi kepercayaan dan jaringan. Meskipun demikian, kecilnya standar deviasi tidak secara otomatis membatasi kemampuan norma dalam menjelaskan variasi antarresponden secara statistik, sehingga diperlukan analisis lanjutan untuk menguji hubungan antarvariabel tersebut.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Ekonomi

Hasil regresi disajikan pada Tabel 2. Modal sosial secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap kelestarian lingkungan dengan $R^2 = 0,930$ ($F = 233,779$; $p < 0,001$), artinya 93,0 persen variasi kelestarian lingkungan dijelaskan oleh kepercayaan, jaringan, dan norma. Secara parsial, jaringan memberikan pengaruh terbesar ($\beta = 0,589$; $p < 0,001$), diikuti kepercayaan ($\beta = 0,301$; $p = 0,006$), sedangkan norma bernilai positif tetapi belum signifikan pada taraf 5 persen ($\beta = 0,117$; $p = 0,068$).

Tabel 2. Hasil regresi linier berganda

Variabel	β (Y1)	Sig. (Y1)	β (Y2)	Sig. (Y2)
Kepercayaan (X1)	0,118	0,676	0,301	0,006
Jaringan (X2)	0,441	0,062	0,589	0,000
Norma (X3)	0,200	0,238	0,117	0,068
R^2	0,509	-	0,930	-
F (Sig.)	18,320	0,000	233,779	0,000

Terhadap kesejahteraan ekonomi, modal sosial berpengaruh signifikan secara simultan ($R^2 = 0,509$; $F = 18,320$; $p < 0,001$), tetapi tidak ada dimensi yang signifikan secara parsial; jaringan mendekati signifikan ($\beta = 0,441$; $p = 0,062$). Pola signifikan simultan namun tidak signifikan parsial ini mengindikasikan korelasi tinggi antardimensi modal sosial ($r = 0,717-0,910$) dan perlu dibaca bersama keterbatasan reliabilitas instrumen kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, pengaruh simultan modal sosial terhadap kedua variabel terikat serta pengaruh parsial kepercayaan dan jaringan terhadap kelestarian lingkungan terbukti, sedangkan pengaruh parsial lainnya belum didukung secara statistik.

Kontribusi Relatif Setiap Dimensi

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jaringan merupakan kontributor dominan pada kedua model, dengan sumbangan efektif 55,78 persen terhadap kelestarian lingkungan dan 30,56 persen terhadap kesejahteraan ekonomi, atau sekitar 60 persen dari total pengaruh modal sosial pada masing-masing model. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan organisasi dan jejaring sosial lokal merupakan area intervensi dengan daya ungkit tertinggi.

Tabel 3. Sumbangan efektif (SE) dan sumbangan relatif (SR)

Variabel	S E Y1	S R Y1	S E Y2	S R Y2
Kepercayaan (X1)	05%	,80%	,05%	,16%
Jaringan (X2)	,56%	,04%	,78%	,98%
Norma (X3)	,24%	,05%	17%	86%
Total	50	10	93	10
(R^2)	,85%	0%	,00%	0%

Jaringan Sosial sebagai Dasar Penguatan Partisipasi Masyarakat

Dominasi jaringan sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan lebih ditentukan oleh keterhubungan antarwarga dan organisasi lokal daripada ketersediaan sarana semata. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi tersebut terwujud melalui gotong royong rutin dan aksi relawan pemuda yang digerakkan oleh Karang Taruna dan kelompok pemuda pecinta alam. Jaringan ini berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang menutup celah ketiadaan armada pengangkutan sampah resmi, sejalan dengan teori modal sosial (Putnam, 1993; Pretty & Ward, 2001). Temuan ini melengkapi Galante (2023) yang merekomendasikan pemberdayaan masyarakat lokal dan pelaku wisata dalam strategi pengelolaan sampah, dengan menambahkan ukuran besaran pengaruh yang dapat dijadikan dasar penentuan prioritas.

Kesenjangan Tata Kelola dan Perilaku Pelaku Wisata

Wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa tata kelola sampah bersandar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur, dan kebijakan operasional Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Terdapat kesenjangan implementasi akibat belum adanya Peraturan Desa sebagai instrumen pelaksana, lemahnya penegakan aturan dan sanksi, serta tumpang tindih kewenangan antara BTNGR dan

pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan Hesti et al. (2025) dan Haqiqi (2026) yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan pelemagaan pengelolaan sampah di kawasan Sembalun.

Pada tingkat pelaku wisata, perilaku bersifat terpolarisasi. Pemandu dan porter yang tergabung dalam asosiasi memiliki tanggung jawab tinggi terhadap sampah logistik pendakian karena terikat norma kelompok dan sanksi sosial, sedangkan sebagian pelaku akomodasi (homestay dan restoran) masih rendah dalam mengadopsi pengelolaan sampah berkelanjutan. Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa pengaruh parsial norma belum signifikan: norma kolektif bekerja kuat pada komunitas yang terorganisasi, tetapi belum merata pada seluruh pelaku usaha wisata.

Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan partisipasi masyarakat dapat diarahkan melalui tiga tahap ekonomi sirkular yang memanfaatkan modal sosial yang telah terbukti kuat. Pada tahap hulu, norma pemilahan sampah dilembagakan dalam Peraturan Desa dan didukung kampanye edukasi melalui jaringan kader PKK dan pemuda dusun. Pada tahap proses, jaringan kelompok tani hortikultura dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang dikembalikan kepada petani. Pada tahap hilir, bank sampah komunal yang dikelola Pokdarwis dan organisasi pemuda mengonsolidasikan dan menjual material anorganik ke industri daur ulang.

Insentif ekonomi yang jelas dan segera dirasakan perlu menyertai ketiga tahap tersebut, karena modal sosial yang kuat tidak otomatis menghasilkan manfaat ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa manfaat bank sampah dan kompos baru dirasakan oleh sebagian kecil kelompok tani dan pelaku usaha. Secara kelembagaan, pemerintah desa perlu mengesahkan Peraturan Desa pengelolaan sampah berkelanjutan yang memuat kewajiban pemilahan dan sanksi progresif, idealnya terintegrasi dengan awig-awig sebagai kearifan lokal agar memiliki legitimasi sosial-budaya yang kuat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama BTNGR perlu menyusun nota kesepahaman untuk menutup kesenjangan kewenangan pengangkutan sampah dari jalur pendakian, sedangkan Pokdarwis bersama pelaku akomodasi dapat menerapkan skema retribusi lingkungan yang dikelola secara transparan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi tingkat presisi sampel (13 persen) yang lebih longgar daripada konvensi umum, reliabilitas instrumen kesejahteraan ekonomi yang berada di bawah ambang (0,664), multikolinearitas antardimensi modal sosial, indikasi heteroskedastisitas pada Model 2, serta desain *cross-*

sectional yang belum menangkap dinamika musim puncak kunjungan wisata. Penelitian lanjutan disarankan menyempurnakan instrumen kesejahteraan ekonomi, menggunakan *structural equation modeling* untuk mengatasi multikolinearitas, dan menerapkan desain longitudinal.

Kesimpulan

Modal sosial masyarakat Desa Sembalun Bumbung berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan norma sebagai dimensi terkuat (3,56), diikuti jaringan (3,25) dan kepercayaan (2,79). Modal sosial berpengaruh sangat signifikan terhadap kelestarian lingkungan secara simultan ($R^2 = 93,0$ persen), dengan jaringan ($\beta = 0,589$) dan kepercayaan ($\beta = 0,301$) sebagai prediktor parsial yang signifikan, sedangkan norma belum signifikan ($p = 0,068$). Modal sosial juga berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan ekonomi ($R^2 = 50,9$ persen), namun tanpa pengaruh parsial yang signifikan, dan temuan ini bersifat indikatif karena reliabilitas instrumennya belum memadai.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Desa Sembalun Bumbung sebaiknya memprioritaskan penguatan jaringan organisasi lokal dan kepercayaan, didukung Peraturan Desa, penegakan tanggung jawab pelaku wisata, dan insentif ekonomi berbasis ekonomi sirkular. Penelitian lanjutan perlu menguji konsistensi temuan ini pada desa lain di lingkaran Gunung Rinjani.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sembalun Bumbung, para informan, dan seluruh responden atas kesediaan dan bantuannya selama pengumpulan data, serta kepada para reviewer atas saran dan komentar yang konstruktif.

Referensi

- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Galante, A. (2023). Strategi mengelola sampah untuk pengembangan pariwisata di Desa Wisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229028>
- Haqiqi, M. H. (2026). Implementasi program Zero Waste melalui Bank Sampah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/273693>
- Hesti, D. E., Johari, H. I., Adiansyah, J. S., & Sukuryadi. (2025). Evaluasi pengelolaan sampah dengan

- pendekatan stakeholder analysis pada kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 13(2), 227-239. <https://doi.org/10.31764/geography.v13i2.31944>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World Development*, 29(2), 209-227. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00098-X)
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). How to construct a mixed methods research design. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 69(Suppl 2), 107-131. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.